

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



Diajukan oleh :
ZULKIFLI PATIHUA
45 06 013 039

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR**

2008

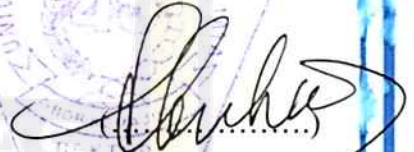
HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : 27 NOVEMBER 2008
Atas Nama : ZULKIFLI. PATIHUA
Stambuk / NIRM : 45 06 013 039

Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas umum : Prof. DR. H. Abu Hamid
(Rektor Universitas "45")



(.....)

Ketua : Haeruddin Saleh, SE. M.Si
(Dekan Fak. Ekonomi Unv. 45)



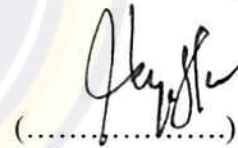
(.....)

Sekretaris : Irwan L. Gaffar, SE. M.Si



(.....)

Anggota Penguji : 1. Drs. Syamsuddin, M.Si. AK



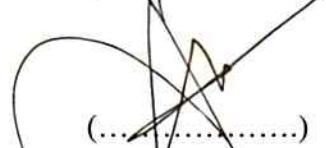
(.....)

2. Firman Menne, SE, M.Si. AK



(.....)

3. Faridah, SE, M.Si. AK



(.....)

4. Thanwain, SE, M.Si



(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

**JUSUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT**

**NAMA MAHASISWA : ZULKIFLI. PATIHUA
NOMOR STAMBUK : 45 06 013 039
JURUSAN : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI**

Menyetujui :

PEMBIMBING I



Drs. SYAMSUDDIN, M.Si, AK.

PEMBIMBING II



FARIDAH. SE, M.Si. AK.

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"



HAERUDDIN SALEH, SE.,M.Si.

Ketua Jurusan Akuntansi



FARIDAH, SE., M.Si. AK.

Tanggal Pengesahan :

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fekultas Ekonomi Universitas “45” MAKassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas“45” beserta pembantu Rektor yang mana telah menmyumbangkan pikiran sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Haeruddin Saleh,SE. Msi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas “45” MAKassar.
3. Ibu Faridah, SE. Msi. AK. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas “45” Makassar.
4. Bapak Syamsuddin, SE.Msi. AK. selaku pembimbing I, dan Ibu Faridah, SE. Msi AK, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam usaha penyempuranaan isi dari penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf fakultas Ekonomi yang telah iklas memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan hinggha selesainya studi ini.
6. teristimewa Aku persembahkan kepada kedua orang tua saya yang mana telah membesarkan Aku dengan penuh kasih sayang yang tiada henti-hentinya dari kecil hinggha sekarang, adik-adikku tersayang, keluarga, serta kawan-kawan yang

tidak kusebut namanya yang turut memberikan bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penulisan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima sumbangsi pikiran dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 11 Januari 2009



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFATAAR TABEL.....	iv
DAFATR SKEMA.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Runusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Kerangka Teori	6
2.1.1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	6
2.1.2. Pelaporan Keuangan Daerah	8
2.1.2.1. Pengertian Pelaporan Keuangan Daerah	8
2.1.2.2. Pengertian Keuangan Daerah	8
2.1.2.3. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah	9
2.1.3. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.1.3.1. Laporan Realisasi Anggaran	12

2.1.3.2. Neraca	13
2.1.3.3. Laporan Arus Kas	14
2.1.3.4. Catatan Atas Laporan Keuangan	14
2.1.3.5. Laporan Kinerja Keuangan	15
2.1.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas	15
2.1.4. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik	16
2.1.5. Pengelolaan Keuangan Daerah	17
2.1.6. Metode dan Teknik Analisis Rasio.....	23
2.2. Kerangka Pikir.....	27
2.3. Hipotesis	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Daerah Penelitian	29
3.2. Metode Pengumpulan Data	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.3.1. Jenis Data	30
3.3.2. Sumber Data	30
3.4. Metode analisis	31
3.5. Definisi Operasional	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Gambaran Umum Pemda Kab. Seram Bagian Barat.....	34
4.1.1. Sejarah Singkat Pemda Kab. Seram Bagian Barat.....	34
4.1.2. Struktur Organisasi Pemda Kab. Seram Bagian Barat.....	35

4.1.3. Analisis Struktur Organisasi Pemerintah.....	38
4.2. Kerangka Komprehensi Penegelolaan Keuangan Daerah Kabuapaten Seram Bagian Barat.....	45
4.3. Laporan Keuanagan Pemda Kab Seram Bagian Barat.....	47
4.4. Analisis Rasio Keuangan Pemda Kab Seram Bagian Barat.....	55
4.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	55
4.4.2. Rasio Efektivitas dan efesiensi PAD.....	56
4.4.3. Rasio Keserasian/Komosisi Belanja.....	58
4.4.4. Rasio Pertumbuhan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61

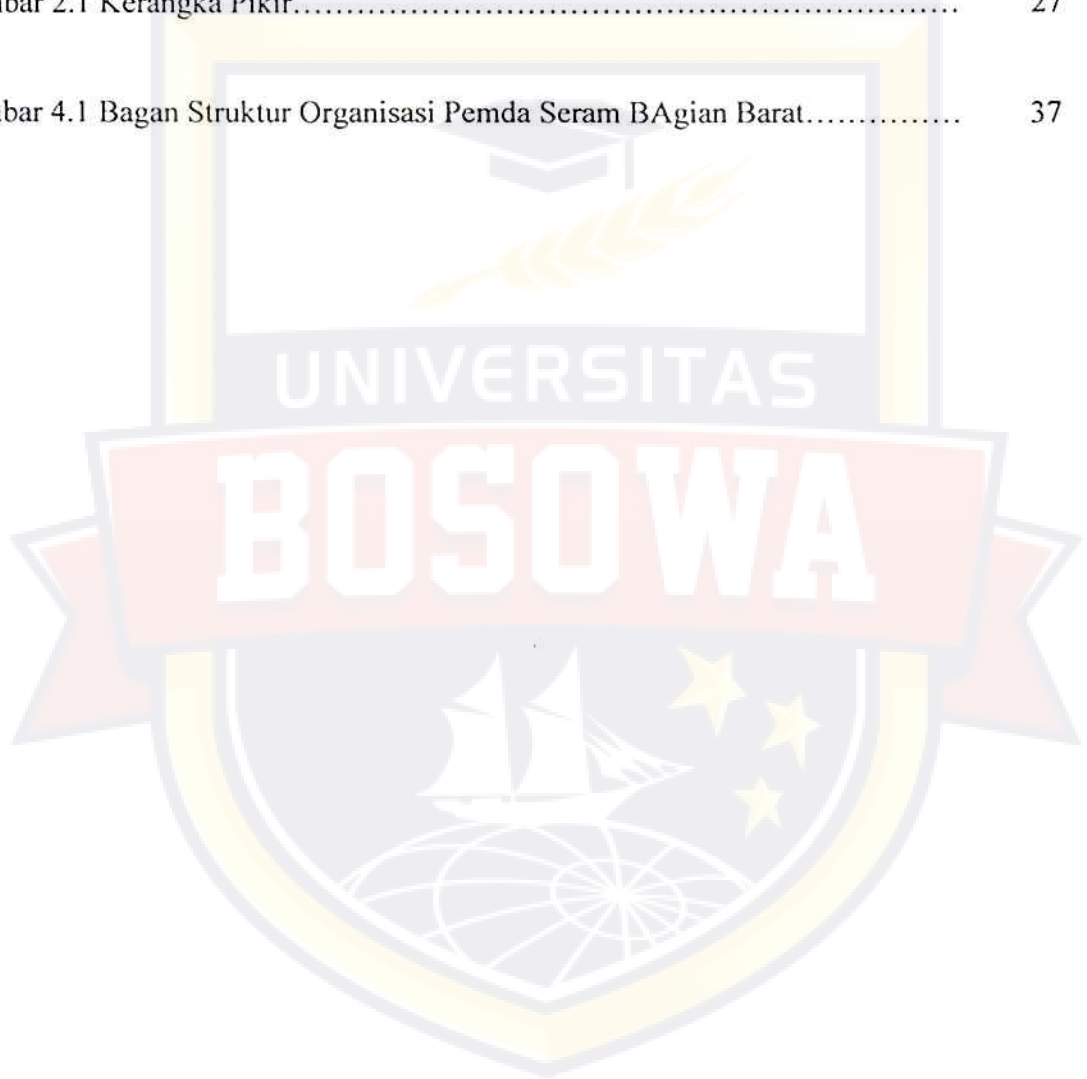
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Des 2006 - 2007.....	48
Tabel 4.2 Neraca Periode 31 Desember 2006 – 2007.....	51
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2006 – 2007.....	53
Tabel 4.4 Perkembangan Pendapatan pada APBD Kab Seram Bagian Barat.....	55
Tabel 4.5 Target dan Realisasi PAD Kab Seram Bagian Barat.....	57
Table 4.6 Perkembangan Belanja APBD Kab Seram Bagian Barat.....	58
Table 4.7 Pertumbuhan APBD Kab Seram BAGian Barat.....	59

DAFTAR SKEMA

No	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
2. Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemda Seram BAgian Barat.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Di era reformasi ini telah terjadi tuntutan perubahan yang sifatnya mendasar dalam pengelolaan dan pelayanan manajemen pemerintahan. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang terjadi pada tahun 1998, telah memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika krisis multi dimensional ini terjadi berbagai pihak sadar bahwa terdapat banyak kelemahan dalam sistem kebijakan pemerintah. Satu diantaranya sistem pengelolaan pemerintahan yang terlalu sentralistik.

Dengan adanya reformasi, sistem pemerintahan yang semula sentralistik kemudian diubah dengan sistem desentralisasi. Tuntutan desentralisasi ini muncul paling tidak karena dua alasan utama yaitu: adanya potensi disintegrasi bangsa dan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia diberlakukan dengan keluarnya UU NO 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diperbaharui dengan UU NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya diperbaharui dengan UU NO 33 Tahun 2004. Disahkannya UU ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2000, juga sejalan dengan semangat *good governance*, yang ditandai dengan ditetapkannya peraturan perundangan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan negara yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP Nomor 108, Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP. No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP. No. 108 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, dan PerMendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, berbagai aturan tersebut juga dapat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sebagai konsekwensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu biasa dipenuhi

apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan adanya analisis rasio keuangan terhadap APBD, maka semua pihak yang berkepentingan memiliki alat ukur untuk melihat beberapa aspek keuangan dalam APBD. Aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu kabupaten juga yang telah menerapkan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis kinerja laporan keuangan daerah dalam mengelolah keuangan daerah dengan menggunakan teknik dan analisis rasio pada hasil yang dicapai dari satu periode. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat **judul “ Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ”**, sebagai judul dalam penulisan skripsi.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “bagaimana hasil kinerja keuangan pada Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melihat kemandirian, tingkat efisien dan efektivitas, pengkomposisi belanja, dan tingkat pertumbuhan selama tahun 2006-2007 ”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan mengukur rasio kemandirian, rasio efisien dan efektivitas dan pemungutan PAD, mengukur rasio komposisi belanja, dan mengukur rasio pertumbuhan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat selama dua periode yaitu 2006-2007.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan bagi instansi pemerintah daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan.
2. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikatifnya.
3. Sebagai referensi bagi penulis dan pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai Analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan.

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.

2.1.1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah.

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah yang mereformasikan pengelolaan keuangan Daerah saat ini. Penerapan otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kebijakan itu biasa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelolah potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal. Secara umum terdapat berbagai defenisi tentang akuntansi keuangan daerah antara lain :

Sedangkan menurut Ulum (2004 : 91) akuntansi keuangan daerah yang didefenisikan sebagai berikut :

"suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporann transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan

ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu”.

Menurut Drs. Abdul Halim. MBA., akt. (2007 : 42), definisi akuntansi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

”proses pencatatan pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah-pemda (kabupaten, kota atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau propinsi) ”.

Berdasarkan definisi di atas, maka keuangan daerah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan sektor publik dalam hal ini keuangan pemerintah berdasarkan pendataan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, sistem penafsiran atas informal keuangan.

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cemat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa dalam rangka pengambilan serta pemcaanaan untuk masa yang akan datang.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membnadungkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan aktivitas suatu pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Pelaporan Keuangan Daerah.

2.1.2.1. Pengertian Pelaporan Keuangan Daerah.

Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah (Lampiran E.XXVII permendagri No. 13 Tahun 2006).

Sedangkan pengertian laporan keuangan dijelaskan oleh Abdul Halim (2002 ; 159) sebagai berikut :

"laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan".

2.1.2.2. Pengertian Keuangan daerah.

Didalam pasal 1 ayat 6. permendagri nomor 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tertentu.

Sedangkan pengertian keuangan daerah dijelaskan oleh Abdul Halim (2002 : 19) mengutip pendapat dari Mamesah (1995) mengartikan keuangan daerah sabagai berikut :

"semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa unag maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

2.1.2.3. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah.

Di dalam lampiran E.XXVII permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Sedangkan fungsi pelaporan keuangan adalah mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.

Namun secara umum,tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik dikemukakan oleh Mardiasmo (2002 , 161) sabagaai berikut :

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*), laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelola sumber daya telah digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*), laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*) laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit

kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat (*publik relation*), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*esource of factct and figures*, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui secara lebih dalam.

Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional

2.1.3. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bentuk laporan anggaran sektor publik, khususnya laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah.
2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh kembali pembayaran oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dana/pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran yang dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman

dan hasil devistasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.3.2. Neraca.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, dana pada suatu waktu tertentu.

Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.
3. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2.1.3.3. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*).

Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi nonm anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pusat/daerah selama periode tertentu.

Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum negara/daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar ari bendahara umum negara.daerah.

2.1.3.4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan kuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan di anjurkan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas lapoan keuangan mengungkapkan hal-hal sbagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi, makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam pelaporan keuangan.
5. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.3.5. Laporan Kinerja Keuangan.

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan klasifikasi fungsionalnya dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

2.1.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas.

perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.4. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik.

Pemakaian laporan keuangan sektor publik dapat didefinisikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi tersebut. Untuk sektor publik yang menjadi stakeholdernya adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003 : 12) sebagai berikut :

1. Stakeholder eksternal yang terdiri dari :
 - a. Masyarakat pengguna jasa publik
 - b. Masyarakat membayar pajak.
 - c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atau aktivitas organisasi.
 - d. Bank sebagai kreditor pemerintah.
 - e. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, Adb, PBB, dsb.
 - f. Infestasi asing dan *Contry Analisis*.
 - g. Generasi yang akan datang.
2. Stakeholder internal yang terdiri dari :
 - a. Lembaga Negara (misalnya : kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb).
 - b. Kelompok Politik (partai politik).
 - c. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur, BUMN/BUMD).
 - d. Pegawai pemerintah.

2.1.5. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam informasi pengelolaan keuangan daerah, ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU. No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Daerah, PP. No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk lebih mempertegas pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja berdasarkan PerMendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut di atas adalah merupakan penyempurnaan dari undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan undang-undang No. 25 Tahun 1999, menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *Budgeting refom* atau reformasi anggaran.

Performance Budget pada adasarnya adalah sistem penyusunan dari pengelolaan anggaran daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sabagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelolah dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan

pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi :

1. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan baik.
2. *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*publik money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

3. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (*frobity*). Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan dalam korupsi dapat diminikmalkan.
4. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan di awasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif,efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor,yaitu dibandingkan dengan yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

Secara psesifik, paradigma anggaran daerah yang di perlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Anggaran daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan tranparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.

4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Menurut BPKP (2000) pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Ada beberapa aspek penting dalam pengukuran kinerja, aspek-aspek ini bisa menjadi sorotan untuk menilai apakah suatu anggaran telah dijalankan sesuai dengan tujuan anggaran serta sejalan dengan prinsip *value for money*. Aspek-aspek tersebut antara lain :

- a. Aspek *finansial*, meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari suatu instansi pemerintahan.
- b. Aspek kepuasan pelanggan (*costumer*), yaitu bagaimana pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Hal ini berarti pengukuran kepuasan pelanggan bisa menjadi informasi yang relevan atas tingkat kepuasan masyarakat.
- c. Operasi Bisnis Internal: Informasi bisnis ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah *in-concert* (seirama) untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam sasaran strategis

- d. Kepuasan komunitas dan *stakeholder*. Pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholder* karena kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya.
- e. Waktu, dimana realibilitas relevansi atas informasi yang menjadi penting dalam pengambilan keputusan

Dalam modul LAN dan BPKP (2000:9) dijelaskan bahwa indikator kinerja di artikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Adapun syarat-syarat indikator kinerja yang ditetapkan untuk semua kelompok kinerja adalah:

- a. Spesifik dan jelas, sehingga mudah di pahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi, dapat di ukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja maupun kesimpulan yang sama.
- b. Relevan, indikator kinerja harus mengenai aspek-aspek objektif yang relevan.
- c. Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
- d. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan dana yang tersedia.
- e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan.

Hal lain dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja adalah mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja organisasi, indikator yang dipakai antara lain :

1. Indikator masukan (*input*) yang mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya yang dimiliki, apakah telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah hasil langsung yang dicapai dari input suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang diterapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, waktu, dan tepat sasaran), manfaat baru dapat dilihat dalam jangka waktu menengah dan panjang.
4. Indikator dampak (*impact*) adalah tolak ukur yang memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, *impact* dapat diketahui dalam menengah dan panjang.

Dengan indikator kinerja, dapat diketahui tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, melahirkan konsensus guna menghindari kesalahan interpretasi serta membangun dasar pengukuran, analisa, dan evaluasi kinerja organisasi. Keberhasilan kinerja sangat ditentukan oleh keakuratan dalam penyusunan indikator dan sasaran kinerja, dan pada besarnya pembiayaan yang digunakan,

sebagaimana dalam anggaran tradisional dengan pendekatan *incremental*-nya. Sebab indikator kinerja adalah inti dari sistem anggaran kinerja.

2.1.6. Metode dan Teknik Analisa Rasio.

Hebry Simamora (2000 ; 522) mengatakan bahwa analisa rasio memperlihatkan hubungan matematis diantara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. hubungan ini di nyatakan dalam persentase, tingkat, maupun proporsi tunggal. Agar memberikan hasil yang optimal, maka penafsiran rasio-rasio haruslah meliputi pengkajian data yang mendasarinya. rasio yang merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan-perusahaan lain. Tujuan pokok rasio-rasio ini adalah menyoroti bidang-bidang yang memerlukan investigasi lebih dalam. Pengembangan rasio keuangan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan informasi para pemakai laporan keuangan, karena bentuk rasio keuangan sangat beragam tergantung aspek yang ingin diketahui dan diukur.

Banyak rasio yang terstandarisasi, rasio tersebut adalah diakui sebagai indikator yang bermanfaat sebagai kinerja keuangan dan dihitung secara rutin serta dipublikasikan berdasarkan keuangan atau industri perusahaan-perusahaan analisis keuangan. Rasio tersebut menjadi tolak ukur terhadap hasil-hasil operasi organisasi dibandingkan pada saat mengevaluasi kinerja.

Untuk lembaga pemerintah, rasio-rasio yang digunakan dijelaskan oleh Abdul Halim 99(2007 : 231) sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) adalah analisa rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayaaar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

- a. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas diformulassikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD sesuai Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan dalam daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau sebesar 100 persen. Semakin besar rasio ini, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

- b. Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Formulasi rasio efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah dalam menjalankan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dari 1 (satu) atau kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio ini berarti kinerja pemerintah semakin baik.

3. Rasio Keserasian/ Komposisi Belanja, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total: APBD}}$$

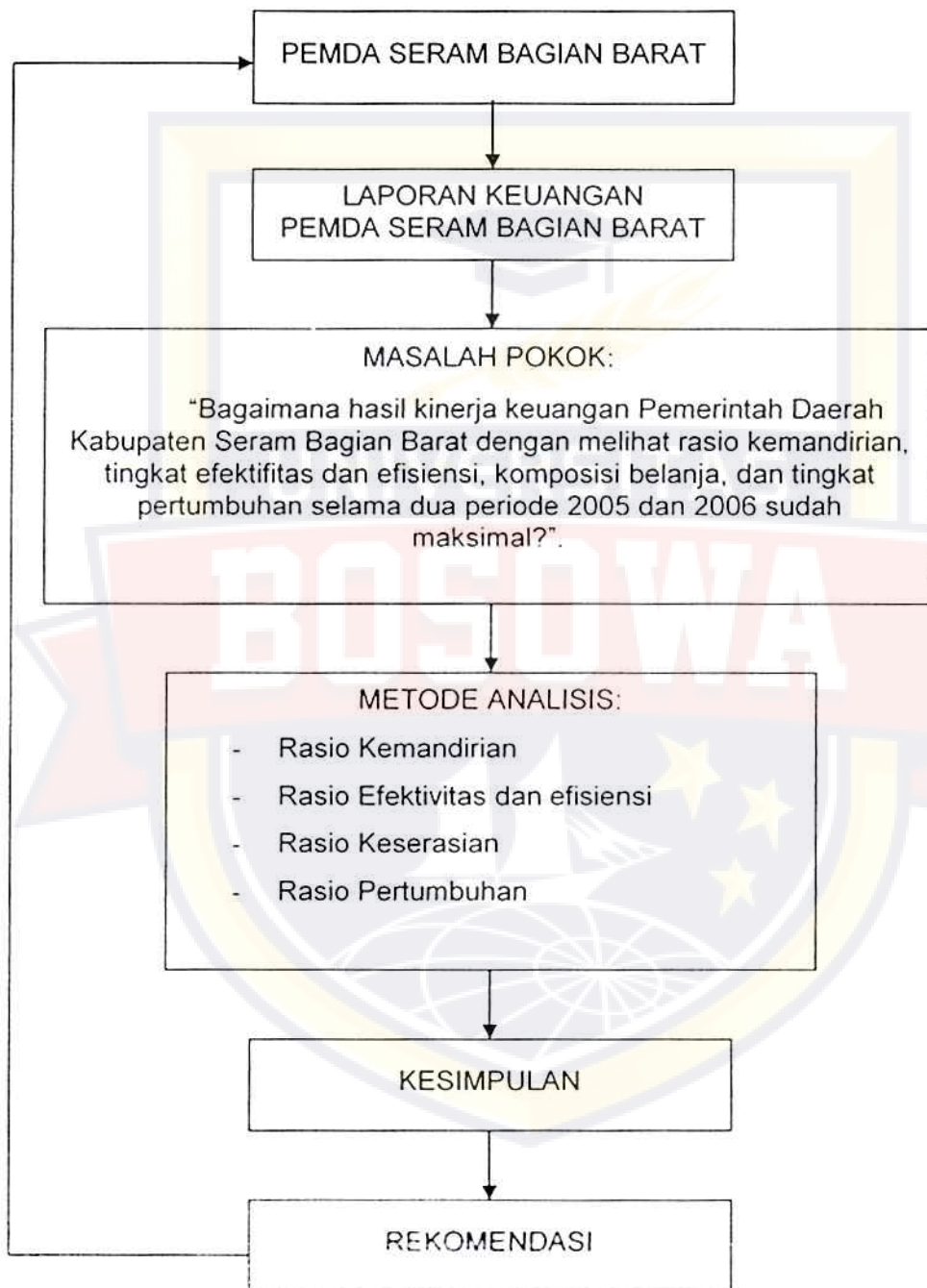
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target.

4. Rasio Pertumbuhan (*growth Ratio*), digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Adapun formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (akhir periode)}}{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (periode sebelumnya)}}$$

pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

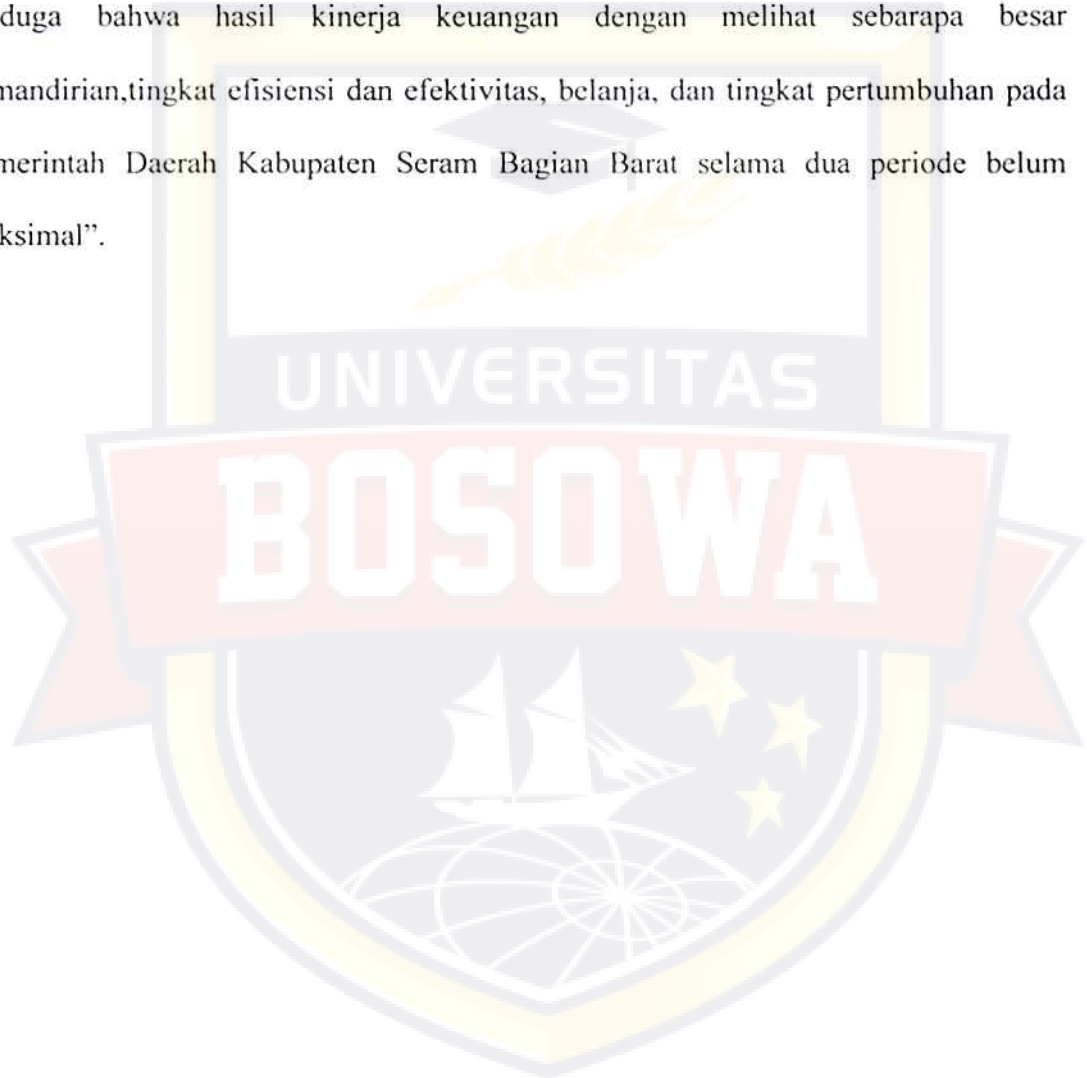
2.2. Kerangka Pikir.



2.3. Hipotesis.

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok diatas, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

”diduga bahwa hasil kinerja keuangan dengan melihat sebarapa besar kemandirian,tingkat efisiensi dan efektivitas, belanja, dan tingkat pertumbuhan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selama dua periode belum maksimal”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlokasi di Piru.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data untuk melengkapi penyusunan proposal ini, maka penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Penelitian perpustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan membaca buku-buku literatur serta bacaan lainnya yang relevan dengan masalah tersebut.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian maka penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Bupati Seram Bagian Barat, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan cara wawancara kepihak yang terkait guna mendapatkan data atau informasi yang lengkap.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

Data kuantitatif, berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah, dokumen-dokumen dan keterangan tambahan yang diperlukan serta berhubungan dengan penelitian.

Data kualitatif, berupa penjelasan dari pejabat yang berwenang yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keuangan, serta Badan Pengawasan Daerah.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak terkait yang berupa dokumen-dokumen laporan keuangan yang bersangkutan dengan penelitian.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah rasio-rasio yang digunakan oleh Abdul Halim (2007:232) untuk lembaga pemerintahan. Adapun analisa rasio (*ratio analysis*) tersebut yaitu:

2.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2.4.2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD sesuai Potensi Riil Daerah}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

2.4.3. Rasio Kecerasan

$$\text{Rasio Kecerasan} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}}$$

2.4.4. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan /PAD/Belanja (akhir periode)}}{\text{Pendapatan /PAD/Belanja (periode sebelumnya)}}$$

Dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

2.5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Akuntansi keuangan daerah yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu.
2. Pengertian Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengertian Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan.

4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu rencana pemerintah daerah dalam mengalokasikan uang yang diperoleh dari masyarakat dan untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik.
5. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.
6. Anggaran kinerja yaitu bagaimana mengolah anggaran yang digunakan untuk suatu kegiatan dengan indikator kinerja terukur yang didasari pada prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.
7. Pengukuran kinerja yaitu merupakan suatu alat manajemen yang digunakan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
8. Indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
9. Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
10. Efisiensi yaitu suatu proses kegiatan operasional, dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten seram Bagian Barat

4.1.1. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten pemekaran, bersamaan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Kabupaten Seram Bagian Barat terletak pada $2,55^{\circ}$ – $3,30^{\circ}$ LS dan 127° – 55° BT. Letak Kabupaten Seram Bagian Barat menurut Geografis di batasi antara lain : sebelah utara berbatasan dengan laut seram, sebelah selatan berbatasan dengan laut handa, sebelah barat berbatasan dengan laut buru, dan sebelah timur berbatasan dengan maluku tengah. Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat kurang lebih 84.181 Km^2 yang terdiri dari luas daratan 5.176 Km^2 dan luas lautannya 79.005 Km^2 . Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai jumlah pulau sebanyak 33 pulau, yang terdiri dari 7 pulau yang dihuni dan 26 pulau yang tidak ada penghuni.

Kabupaten Seram Bagian Barat sebelum pemekaran hanya sebagai salah satu kecamatan yang bernama Seram Barat, yang berada pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Setelah pemekaran kecamatan Seram Barat berubah menjadi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan kepadatan penduduk kurang lebih 156.356 jiwa yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Seram Barat
2. Kecamatan Kairatu
3. Kecamatan Taniwel, dan
4. Kecamatan Waisala

4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi memerlukan manajemen yang baik agar bias mencapai tujuan, karena manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Apalagi makin kompleks hubungan didalamnya, maka terbentuklah struktur organisasi yang menggambarkan suatu system tugas wewenang dan tanggung jawab serta fungsinya masing-masing pegawai pemerintah yang ada didalam organisasi tersebut. Dengan demikian organisasi dapat berjalan dinamis sesuai dengan kedinamisan masyarakat. Sehingga bentuk organisasi selalu menyesuaikan diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan struktur organisasi maka peememrintah daerah kabupaten S eram Bagian Barat melengkapi diri dengan struktur organisasi yang berdasarkan *line organization system* pengorganisasian yang di susun menurut garis hirarki dari atas kebawah, sehingga diadakan pembagian fungsional dalam

penyelenggaraan aktivitas pemerintah. Adapun gambar Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat sebagai berikut :

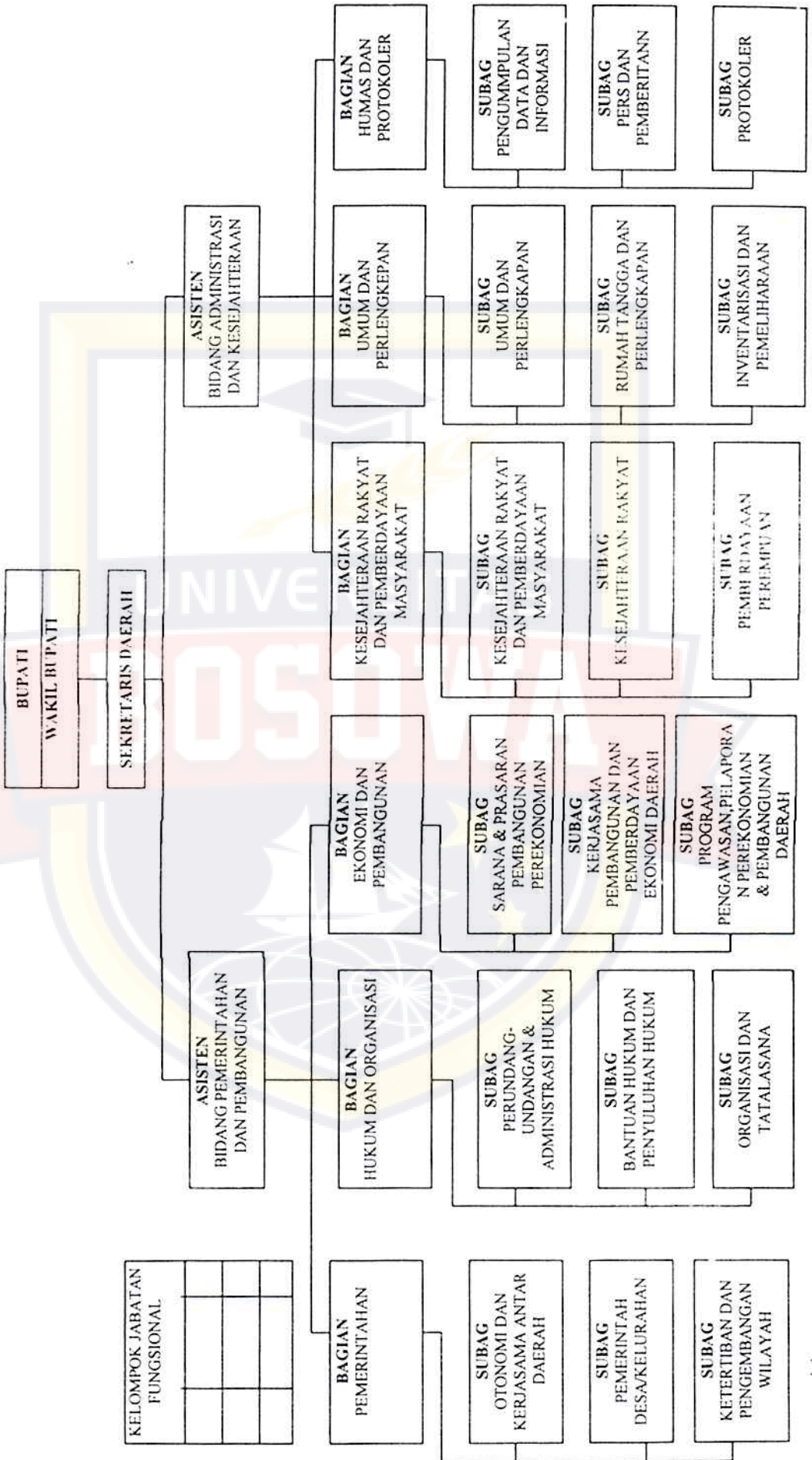


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Nomor : 17 Tahun 2007

Tanggal : 18 Desember 2007

Gambar 4.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



4.1.3. Analisis Struktur Organisasi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan bentuk struktur organisasi dari kelompok jabatan fungsional. Hal ini relevan dengan luas dan besarnya kekuasaan serta yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan aturan pusat. Sebagai Pemerintahan kabupaten tentunya memiliki visi dan misi pemerintahan, maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pada proses operasionalisasi khususnya mengenai peraturan lalulintas keuangan daerah di kendalikan oleh Bupati sebagai penanggung jawab umum dalam pemerintahan di daerah. Dalam struktur organisasi tampak bahwa terjadi pendelegasian wewenang dan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Bupati (Wakil Bupati)

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai pemegang mandate rakyat guna untuk menjalankan visi dan misi ke pemerintahannya, maka tentunya telah hadir perangkat-perangkat kelembagaan sebelum menjabat sebagai Bupati. Hanya saja Bupati mempunyai keleluasaan untuk merombak struktur dan fungsi dalam pemerinyahan sesuai dengan aturan main yang ada dan disetujui oleh DPRD sebagai pemegang mandate rakyat. Akan tetapi, guna memudahkan Bupati dalam menjalankan aktivitas pemerintahan maka sebagian tugas dan wewenangnya

dilimpahkan kepada Sekretariat Kabupaten sebagai pimpinan sekretariat kabupaten dan instansi fungsional yang ada di daerahnya.

2. Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah adalah unsure staf pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris daerah mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adminisrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan umum, pengawasan penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan pembagian bidang hokum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana dan perumusan bahan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) bagian :

Bagian Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu asisten bidang pemerintahan dan pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa/kelurahan,

pembinaan administrasi perangkat daerah serta pengembangan daerah otonom.

Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) sub bagian :

3.1.1. Sub bagian otonom dan kerjasama antara daerah

Mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun, menganalisa data penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, kerjasama kewenangan daerah, mempersiapkan bahan penyusunan LPPD.

3.1.2. Sub bagian pemerintahan desa/kelurahan

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan petunjuk teknis data pemerintahan desa/kelurahan dan perkembangan lembaga desa

3.1.3. Sub bagian ketertiban dan pengembangan wilayah

Mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketertiban dan pengembangan wilayah.

Bagian Hukum dan Organisasi.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu asissten bidang pemerintahan dan pembangunan dalam melaksanakan perkembangan hukum menyangkut tugas pemerintah daerah meneliti penyampaian bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, memeberikan bantuan hukum, sosialilsasi dan fasilitasi supermasi hukum dan penegakan HAM serta melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebniijakan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan analisis dan formasi jabatan serta pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja unit organisasi.

Bagian Hukum dan Organisasi membawahi 3 (tiga) sub bagian :

3.2.1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.

Mempunyai tugas pokok yaitu mempersiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan pengawasan dan evaluasi penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan intruksi bupati.

3.2.2. Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Penyuluhan Hukum.

Mempunyai tugas yaitu mempersiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pengawasan dan evaluasi bantuan hukum, hak asasi manusia dan penyuluhan hukum.

3.2.3. Sub Bagian Organisasi dan Tetalaksana.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian hukum dan organisasi kelembagaan perangkat daerah, menatalaksana formasi dan analisa jabatan.

Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu asisten bidang pemerintahan dan pembangunan dalam menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan program pengendalian administrasi pembangunan daerah.

Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) sub bagian :

3.3.1. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pembangunan Perekonomian

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian ekonomi dan pembangunan dalam mengumpulkan data dan bahan pembinaan, perizinan serta petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana pembangunan perekonomian.

3.3.2. Sub Bagian Kerjasama Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi

Mempunyai tugas yaitu membantu kepala bagian ekonomi dan pembangunan dalam mengumpulkan data dan bahan pembinaan pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pemberdayaan ekonomi daerah.

3.3.3. Sub Bagian Program Pengawasan, Pelaporan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.

Mempunyai tugas yaitu membantu kepala bagian ekonomi dan pembangun dalam mengumpulkan data dan bahan pelaksanaan program pengawasan pelaporan perekonomian dan pembangunan daerah.

4. Asisten Bidang Administrasi dan Kesejahteraan

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pelaksanaan administrasi sarana prasarana dan rumah tangga pemda, umum dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokoler serta kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat.

Asisten Bidang Administrasi dan Kesejahteraan membawahi 3 (tiga) bagian :

4.1. Bagian Umum dan Perlengkapan

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu asisten bidang administrasi dan kesejahteraan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian urusan rumah tangga pimpinan dan kesekretariatan daerah, dan penyusunan prasarana kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana pemerintahan daerah pengelolaan ketatausahaan dan keuangan serta pengelolaan administrasi kearsipan sekretariat.

Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi 3 (tiga) sub bagian :

4.1.1. Sub Bagian Umum dan Tatausaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melakukan tatausaha, kegiatan kearsipan dan pengendalian serta melakukan tatausaha keuangan sekretariat daerah

4.1.2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Mempunyai tugas pokok yaitu melakukan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan dinas, perawatan kendaraan dinas akomodasi dan ruangan, rumah jabatan serta pemeliharaan kebersihan kantor dan pekarangannya.

4.1.3. Sub Bagian Infentaris dan Pemeliharaan

Mempunyai tugas pokok yaitu melakukan administrasi penyiapan, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta menyiapkan administrasi penghapusan barang.

4.2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu asisten bidang administrasi dan kesejahteraan melaksanakan tugas kesekretariatan daerah dibidang Humas dan protokoler.

Bagian Humas dan Protokoler membawahi 3 (tiga) sub bagian :

4.2.1. Sub bagian Pengumpulan Data dan Informasi

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian Humas dan protokoler untuk mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengumpulan, pendataan evaluasi dan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4.2.2. Sub Bagian Pers dan Pemberitaan

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian untuk menyiapkan kajian tentang pers dan pemberitaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan nama baik, citra, martabata dan wibawa pemerintah daerah.

4.2.3. Sub Bagian Protokoler.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian untuk melaksanakan pembinaan teknis di bidang protokoler.

4.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu asisten bidang administrasi dan kesejahteraan dalam penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kesejahteraan rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi 3 (tiga) sub bagian :

4.3.1. Sub bagian Pemberdayaan Masyarakat.

Mempunyai tugas yaitu membantu kepala bagian untuk menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat.

4.3.2. Sub bagian Kesejahteraan Rakyat.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian administrasi dalam urusan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3.3. Sub bagian Pemberdayaan Perempuan.

Mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala bagian menyelenggarakan teknis administrasi dalam urusan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan.

4.2. kerangka Komprehensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam hubungan dengan penyusunan sistem akuntansi, manajemen dalam hal ini bagian keuangan daerah, bertanggung jawab untuk selalu melakukan kegiatan *Follow-up*, yaitu kegiatan mengecek jalannya sistem akuntansi. Pengecekan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah keluaran (*output*) dari sistem itu sesuai dengan kebutuhan informasi. Pihak eksternal dan pihak internal memerlukan informasi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Apakah kebutuhan masing-masing pihak

berubah, maka diperlukan informasi yang sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pemerintah pusat atau bahkan dalam bentuk ekstrim menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat yang lebih atas ataupun kepada instansi vertikal. Kelemahan finansial daerah juga merupakan sumber frustrasi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang akan menghambat kinerja.

Berbagai faktor dapat menyebabkan kondisi tersebut seperti : kerancuan pola penyerahan urusan-urusan otonomi, sistem kontrol pemerintah yang berlebihan dan kondisi perekonomian daerah yang rendah dan sebagainya. Pada umumnya Negara yang menekankan kepada sistem desentralisasi akan memberikan otonomi keuangan daerah yang diskresi kepada pemerintah daerah untuk menentukan dan memungut pajak-pajak daerah dan menentukan pola penggunaannya sendiri.

Salah satu masalah utama dalam keuangan daerah adalah kesulitan dalam menentukan kebutuhan keuangan pemerintah daerah secara objektif dan rasional. Faktor pertama yang menentukan adalah urusan-urusan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam keuangan daerah "*money follow function*". Dari asumsi-asumsi di atas yang menggambarkan tentang dinamika-dinamika pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini juga terlepas dari kondisi yang dialami atau dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

4.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik yang menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah

Pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat sebagai salah satu organisasi publik juga wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang berisi gambaran tentang kondisi keuangan serta kinerja yang dicapainya selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Selain itu laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal yaitu DPRD atau lembaga legal yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Laporan keuangan disajikan selama dua tahun yaitu 2006 dan 2007 dapat dilihat pada table 4.1, table 4.2, table 4.3.

Tabel 4.1
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE 31 DESEMBER 2006 DAN 2007

NO	URAIAN	2006	2007
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	239.054.841	428.561.160
4	Pendapatan Retribusi	715.999.690	1.053.564.645
5	Pendapatan Hasil Pengelolaah Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.930.103.410	4.544.735.572
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	4.885.157.941	6.026.861.377
8			
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	4.007.746.958	3.313.951.098
12	Dana bagi Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.184.245.389	-
13	Dana Alokasi Umum	228.751.000.000	257.880.756.600
14	Dana Alokasi Khusus	35.800.000.000	99.928.133.809
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	284.742.992.347	361.122.841.507
16			
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		
18	Dana Otonomi Khusus	-	-
19	Dana Penywsuaian	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	-	-
21			
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.159.584.215	15.276.180.901
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	1.159.584.215	15.276.180.901
26	Total Pendapatan Transfer (15+20+25)	285.902.576.562	376.399.022.408
27			
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
29	Pendapataan Hibah	-	3.000.000.000
30	Pendapatan Dana Darurat	6.000.000.000	-
31	Pendapatan lainnya	-	-
32	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (29 s/d 31)	6.000.000.000	3.000.000.000
33			
34	TOTAL PENDAPATAN (7+26+32)	296.787.734.503	385.425.883.785
35			
36	BELANJA		
37	BELANJA OPERASI		
38	Belanja Pegawai	77.500.828.103	107.687.433.904
39	Belanja Barang	42.753.021.010	68.336.129.883
40	Bunga	-	-
41	Subsidi	842.649.689	12.72.747.191
42	hibah	-	-
43	Bantuan Sosial	8.316.974.074	1.620.941.160
44	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)	129.413.472.876	193.505.722.578
45			
46	BELANJA MODAL		
47	Belanja Tanah	300.000.000	1.046.020.200

48			
49	Belanja Peralatan dan Mesin	35.676.086.742	23.991.846.505
50	Belanja Modal Alat-Alat Besar	1.848.000.000	-
51	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan	11.682.747.690	4.076.664.799
52	Belanja Modal Alat-Alat Ukur	-	36.950.000
53	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	321.899.100	72.000.000
54	Belanja Modal Alat-Alat Pengolahan	72.000.000	584.662.000
55	Belanja Modal Alat-Alat Perikanan	59.862.000	5.269.439.667
56	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian	52.568.250	-
57	Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.131.096.567	8.933.804.709
58	Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi	1.200.626.925	469.819.000
59	Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran	2.412.672.600	1.396.996.750
60	Belanja Modal Alat-Alat Senam dan Olah Raga	-	151.094.860
61	Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium	279.169.800	2.565.414.720
62	Belanja Modal Bantuan Dana Bergulir	-	435.000.000
63			
64	Belanja Gedung dan Bangunan	33.281.247.306	49.708.201.198
65	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.221.529.733	34.837.797.310
66	Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal	3.059.717.573	14.870.403.888
67	Belanja Modal Monumen dan Tugu	-	-
68			
69	Belanja, Jalan, irigasi, dan Jaringan	34.481.335.974	30.449.831.676
70	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.552.284.307	20.107.870.461
71	Belanja Modal Bangunan Air	4.396.086.577	6.500.000
72	Belanja Modal Instalasi	1.956.833.090	61.000.000
73	Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	379.525.000
74	Belanja Modal Jaringan	5.576.132.000	9.894.936.215
75			
76	Belanja Aset Tetap Lainnya	875.313.910	4.740.335.090
77	Belanja Modal Buku/Perpustakaan	486.583.910	228.310.060
78	Belanja Modal Bercorak Kesenian	5.250.000	117.248.000
79	Belanja Modal Bercorak Keagamaan	6.250.000	-
80	Belanja Modal Bercorak Keagamaan	377.230.000	4.394.777.030
81			
82	Jumlah Belanja Modal (47+49+64+69+76)	104613983932	109936234669
83			
84	BELANJA TAK TERDUGA		
85	Belanja Tak Terduga	6.215.375.850	70.000.000
86	Jumlah Belanja Tak Terduga (85)	6.215.375.850	70.000.000
87			
88	TOTAL NELANJA (44+82+86)	303.511.957.247	419.063.166.204
89			
90	TRANSFER		
91	TRANSFER BAGI HASIL DESA		
92	Bagi Hasil Pajak	1.756.635.000	4.495.000.000
93	Bagi Hasil Retribusi	-	-
94	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
95	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa (92 s/d 94)	1.756.635.000	4.495.000.000
96			
97	TOTAL TRANSFER	1.756.635.000	4.495.000.000
98			
99	TOTAL BELANJA+TRNASFER	241.999.467.658	30.800.6957.247
100			
101	SURPLUS (DEFISIT) (34 - 99)	54.788.266.845	77.418.926.538

102			
103	PEMBIAYAAN		
104	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
105	Penggunaan SiLPA	1.304.789.291	-
106	Perencanaan Dana Cadangan	-	-
107	Penerimaan Pencairan Dana Investasi Berjangka-Deposito	-	-
108	Hasil Penjualan Kekaayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
109	Jumlah Penerimaann (105 s/d 108)	1.304.789.291	-
110			
111	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
112	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
113	Penyertaan Modal Pememrintah Daerah	250.000.000	250.000.000
114	Penempatan Dana Depodito	10.000.000.000	-
115	Jumlah Pengeluaran (112 s/d 114)	10.250.000.000	250.000.000
116			
117	PEMBIAYAAN NETTO (109 - 115)	(8.945.210.709)	(250.000.000)
118			
119	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	45.843056.136	77.168.926.538



Tabel 4.2
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
N E R A C A
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2007

NO	URAIAN	2006	2007
1	ASSET		
2	ASSET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	45.613.420.636	118.207.384.263
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	287.724.474	12.594.935.863
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	78.826.000
6	Investasi Jangka Pendek	-	-
7	Piutang Pajak	-	-
8	Piutang Retribusi	-	-
9	Piutang Lainnya	-	8.866.194.546
10	Persediaan	-	1.965.407.545
11	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 10)	45.901.145.110	141.712.748.217
12			
13	INVESTASI JANGKA PANJANG		
14	<i>Investasi Non Permanen</i>	-	-
15	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
16	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	350.000.000
17	jumlah investasi non parmanen (14 s/d 16)	-	350.000.000
18			
19	<i>Investasi Permanen</i>		
20	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	250.000.000	500.000.000
21	Investasi Permanen Lainnya (Deposito)	10.000.000.000	-
22	Jumlah Investasi Permanen (20 s/d 21)	10.250.000.000	850.000.000
23			
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang (17 + 22)	10.250.000.000	850.000.000
25			
26	AKTIVA TETAP		
27	Tanah	10.306.000.000	11.404.632.900
28	Peralatan dan Mesin	17.633.127.000	48.594.232.600
29	Bangunan	128.510.200.000	118.654.870.297
30	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.461.700.000	85.012.368.176
31	Kendaraan	15.790.300.000	-
32	Aset Tetap Lainnya	-	2.839.624.090
33	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	56.271.726.201
34	Akumulasi Penyusutan	-	-
35	Jumlah Aset Tetap (27 s/d 34)	234.701.327.000	322.777.454.264
36			
37	DANA CADANGAN		
38	Dana Cadangan	-	-
39	Jumlah Dana Cadangan (37 s/d 37)	-	-
40			
41	ASSET LAINNYA		
42	Aset Tak Berwujud	-	-
43	Aset Lain-Lain	-	-
44	Jumlah Aset Lainnya (42 s/d 43)	-	-
45			
46	JUMLAH ASET (11+ 24 + 35 + 39 + 44)	290.852.472.110	465.340.202.481
47			

48	KEWAJIBAN		
49	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	577.233.901
51	Utanga Jangka Pendek Lainnya	-	-
52	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (52 s/d 53)	-	577.233.901
53			
54	JUMLAH KEWAJIBAN (54)	-	577.233.901
55			
56	EKUITAS DANA		
57	EKUITAS DANA LANCAR		
58	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Sil.PA)	45.901.145.110	136.605.300.771
59	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	78.826.000
60	Cadangan Piutang	-	248.598.000
61	Cadangan Persediaan	-	1.965.407.545
62	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-
63	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (58 s/d 62)	45.901.145.110	141.135.514.316
64			
65	EKUITAS DANA INVESTASI		
66	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	850000000
67	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	234701327000	322777454264
68	Diinvestasikan dalam Aset Daerah Yang Dipisahkan	102500000000	-
69	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-
70	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (66 s/d 69)	244951327000	323627454264
71			
72	EKUITAS DANA CADANGAN		
73	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-
74	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (73)	-	-
75			
76	JUMLAH EKUITAS DANA (63+ 70 + 74)	290.852.472.110	464.762.968.580
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (54 + 76)	290.852.472.110	465.340.202.481

Tabel 4.3
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 2006-2007

NO	URAIAN	2006	2007
1	ARUS KAS DARI AKTIVITS OPERASI		
2	ARUS KAS MASUK		
3	Pendapatan Pajak Daerah	239.054.841	428.561.160
4	Pendapatan Retribusi	715.999.690	1.053.564.645
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.930.103.410	4.544.735.572
7	Dana Bagi Hasil Pajak	4.007.746.958	3.313.951.098
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.184.24.538	-
9	Dana Alokasi Umum	228.751.000.000	25.7880.756.600
10	Dana Alokasi Khusus	35.800.000.000	99.928.133.809
11	Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Dana Penyesuaian	-	-
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1159584215	15276180901
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Pendapatan Hibah		3.000.000.000
16	Pendapatan Dana Darurat	6.000.000.000	-
17	Pendapatan Lainnya	-	-
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	296.787.734.503	385.425.883.785
19			
20	ARUS MASUK KAS		
21	Belanja Pegawai	77.500.828.103	107.687.433.904
22	Belanja Barang	42.753.021.010	68.336.129.883
23	Bunga		
24	Subsidi	842.649.689	1.272.747.191
25	Hibah		
26	Bantuan Sosial	8.316.974.074	16.209.411.600
27	Belanja Tak Terduga	6215.375.850	70.000.000
28	Bagi Hasil Pajak	1.756.635.000	4.495.000.000
29	Bagi Hasil Retribusi	-	-
30	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 30)	137.385.483.726	198.070.722.578
32			
33	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 31)	159.402.250.777	187.355.161.207
34			
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASSETNON KEUANGAN		
36	ARUS MASUK KAS		
37	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	-	-
38	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	-	-
39	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
40	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
41	Pendapatan dan Penjualan Aset Tetap	-	-
42	Pendapatan dan Penjualan Aset Lainnya	-	-
43	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 42)	-	-
44			
45	ARUS MASUK KAS		
46	Belanja Tanah	10.306.000.000	1.046.020.200
47	Belanja Peralatan dan Mesin	17.633.127.000	23.991.846.505

48	Belanja Gedung dan Bangunan	128.510.200.000	49.708.201.198
49	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.461.700.000	30.449.831.676
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.790.300.000	4.740.335.090
51	Belanja Aset Lainnya		
52	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 51)	234.701.327.000	109.936.234.669
53			
54	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (43 - 52)	(234.701.327.000)	(109.936.234.669)
55			
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
57	<i>ARUS MASUK KAS</i>		
58	Penerimaan Sisa UYHD Tahun Lalu	-	-
59	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 58)	-	-
60			
61	<i>ARUS KELUAR KAS</i>		
62	Pembentukan Dana Cadangan		
63	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	250.000.000	250.000.000
64	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	10.000.000.000	-
65	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	6.380.214.546
66	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 65)	10.250.000.000	6.630.214.546
67			
68	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (59 - 65)	(10.250.000.000)	(6.630.214.546)
69			
70	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
71	<i>ARUS MASUK KAS</i>		
72	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	6.311.943.205
73	Jumlah Arus Masuk Kas (71 s/d 71)	-	6.311.943.205
74			
75	<i>ARUS KELUAR KAS</i>		
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	5.752.020.554
77	Jumlah Arus Keluar Kas (75 s/d 75)	-	5.752.020.554
78			
79	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (73 - 77)	-	559.922.651
80			
81	Kenaikan/Penurunan Kas (33 + 54 + 67 + 78)	(85.549.076.223)	71.348.634.643
82	Saldo Awal Kas di BUD	1.304.789.291	59.816.505.167
83	Saldo Akhir Kas di BUD	45.613.420.636	131.165.1398.810
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	287.724.474	17.068.550
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	78.826.000
86	Saldo Akhir Kas (101 + 102 + 103)	45901145110	131.261.034.360

4.4. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat

Analisis rasio merupakan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Analisis ini menunjukkan hubungan matematis di antara suatu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam presentasi, tingkat maupun proses tunggal. Analisis rasio keuangan ini di gunakan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari pemerintah daerah Seram Bagian Barat yaitu sebagai berikut :

4.4.1. Rasio Kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Table 4.4
Perkembangan Pendapatan pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun Anggaran 2006 -2007

No	Uraian	2006	2007
	Pendapatan		
1	Pandapatab Asli Daerah	4.885.157.941	6.026.861.377
2	Dana Perimbangan	285.902.576.215	376.399.022.408
3	Lainilain Pendapatan Yang Sah	6.000.000.000	3.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	240.242.832.658	303.511.957.247

Sumber : Bagian Keuangan Pemkab Seram Bagian Barat

296.787.734.156 | 305.425.883.785

$$\text{Rasio Kemandirian 2006} = \frac{4.885.157.941}{(285.902.576.215+6.000.000.000)} = 7.52 \%$$

$$\text{Rasio Kemandirian 2007} = \frac{6.026.861.377}{(376.399.022.408+3.000.000.000)} = 9.51\%$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2007 dalam mencukupi kebutuhan dana untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan social, terhadap masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1.99 %. Adanya PAD pada tahun 2007 menunjukkan kontribusi masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah yang artinya partisipasi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembangunan semakin meningkat.

4.4.2. Rasio Efektivitas dan Rasio Efesiensi.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Sesuai Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektivitas apabila rasio mencapai minimal 1 atau kurang dari 100 % (semakin kecil rasio ini semakin baik).

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemunutan pendapatan daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100 % (semakin kecil rasio ini semakin baik)

Table 4.5
Target dan Realisasi PAD Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun Anggaran 2006-2007

NO	KETERANGAN	2006		2007	
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
1	Pajak Daerah	678.000.000	239.054.841	1.068.050.000	428.561.160
2	Retribusi Daerah	962.000.000	715.999.690	1.244.000.000	1.053.564.645
	Jumlah	1.640.000.000	955.054.531	2.312.050.000	1.482.125.805
	Biaya Pemungutan	1.982.342.671	1.550.619.347	2.321.372.488	2.013.457.301
	Rasio Efektivitas		90.34 %		65.92 %
	Rasio Efisiensi		62.35 %		35.84 %

Sumber : Bagian Keuangan Pemkab Seram Bagian Barat

Dari data pada table 4.5 diatas terlihat bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD-nya Pada tahun 2007 hanya mencapai 65.92%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memungut PAD-nya belum dikategorikan efektivitas, hal ini terlihat dari rasio yang dicapai masih kurang dari 100 %, untuk rasio efisiensi perolehan PAD pada tahun 2007, pemerintah daerah mencapai rasio sebesar 35.84 %, hala ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih efisiensi dalam pemungutan PAD-nya karena standar standar rasio adalah kurang dari 1 (satu) atau 100 % (lebih kecil lebih baik).

4.4.3. Rasio Keserasian.

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}}$$

Tabel 4.6
Perkembangan Belanja APBD Daerah Seram Bagian Barat
Tahun Anggaran 2006-2007

No	URAIAN	2006	2007
1	Belanja	240.242.832.658	303.511.957.247
2	Belanja Operasional	129.413.472.876	193.505.722.578
3	Belanja Modal	104.613.983.932	109.936.234.669
4	Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	1.756.635.000	4.495.000.000
5	Belanja tidak terduga	6.215.375.850	70.000.000

Sumber : Bagian Keuangan Pemkab Seram Bagian Barat

Berdasarkan data di atas, maka rasio keserasian dapat dihitung sebagai berikut :

- Rasio Belanja terhadap APBD tahun anggaran 2006

$$\frac{129.413.472.876}{240.242.832.658} = 12,24 \%$$

- Rasio Belanja terhadap APBD tahun anggaran 2007

$$\frac{193.505.722.578}{303.511.957.247} = 45,96 \%$$

Dari perhitungan diatas, terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun 2007 belum diprioritaskan untuk kebutuhan belanja.

4.4.4. Rasio pertumbuhan.

Table 4.7
Pertumbuhan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun Anggaran 2006-2007

NO	URAIAN	2006	2007
1	Pendapatan	296.787.734.503	385.425.883.785
	Pertumbuhan Pendapatan		12.98 %
2	Pendapatan Asli Daerah	4.885.157.941	6.026.861.377
	Pertumbuhan PAD		12.33 %
3	Belanja	240.242.832.658	303.511.957.247
	Pertumbuhan Belanja		12.63 %

Sumber : Bagian Keuangan Pemkab Seram Bagian Barat

Berdasarkan angka-angka di atas dapat dijelaskan bahwa APBD Kabupaten Daerah Seram Bagian Barat pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan. Pendapatan pertumbuhan sebesar 12.98 %. Total pendapatan tersebut disumbang oleh PAD sebesar 12.33 %. Namun pertumbuhan tersebut dibarengi dengan bertumbuhnya belanja sebesar 12.63 %. Dari data tersebut terlihat bahwa APBD Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih relatif lebih besar dari pada pertumbuhan belanjanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan dan hasil pengelolaan data, dapat disimpulkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan hal sebagai berikut :

- a. Analisa rasio kemandirian keuangan daerah, terlihat bahwa kemandirian keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2007 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh peningkatan bantuan dana perimbangan dari pusat yang sebanding dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Pada analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi PAD, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam merealisasikan PAD-nya tahun 2007 belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan oleh rasio efektifitasnya yang pencapaiannya 92.51 % (kurang dari 100 %) sedangkan standar rasio minimal 100 % (lebih besar lebih baik). Sedangkan untuk rasio efisiensi PAD mencapai 38 % (kurang dari 100 %) sehingga dikategorikan efisiensi karena standar rasio ini maksimal mencapai 100 % (lebih kecil lebih bagus).
- c. Dari rasio keserasian/komposisi belanja pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2007, terlihat bahwa komponen belanja belum diprioritaskan untuk kepentingan belanja.

- d. Pada analisis rasio pertumbuhan, terlihat APBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2007 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pendapatan yang sedikit lebih besar dari pertumbuhan belanja menunjukkan hal yang positif bagi pemerintah daerah.

5.2. Saran

Adapun hal-hal yang dapat penulis sarankan guna kepentingan perbaikan kinerja kerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dimasa yang akan datang serta menjadi sumbangsi bagi peneliti sebagai berikut :

1. Agar pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ditahun yan akan datang dapat meningkatkan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan daerah maka efisiensi dan efektivitas pemungutan PAD harus di tingkatkan.
2. Mengingat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, maka sebaliknya pemerintah daerah melakukan penghematan terhadap komponen-komponen belanja yang tidak *urgensi*, dan mengalihkan kepada komponen pembiayaan yang sifatnya dapat memberikan kontribusi positif pada total penerimaan daerah.
3. Agar laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan informasi yang relevan, maka laporan keuangan tersebut harus sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sesuai dengan Kepmendagri No 13 tahun 2006

4. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman aparatur terhadap system akuntansi keuangan sector publik, sehingga laporan akuntansi yang disajikan dapat menjadi alat yang proporsional dan efektif untuk penyajian keputusan secara strategis.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dimasa yang akan datang sebaiknya melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan analisis-analisis yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tujuan analisis laporan keuangan diharapkan dapat membantu pihak manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan pembangunan dimasa yang akan datang, meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mengukur kinerjanya.
6. Karena penelitian ini masih menggunakan indikator kinerja keuangan yang terbatas pada aspek kemandirian, efektivitas dan efisiensi, keserasian/komposisi belanja, dan pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bactiar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. PPA FE UGM. Yogyakarta.
- , 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- , 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul Untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy, 2004. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Analisis Keuangan APBD*. Published at [http://www. Sleman.go.id](http://www.Sleman.go.id)
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Hafiz Tanjung, Abdul, 2007. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pergaulan. Jakarta.
- Mahsun, Mohammad, Sulistyowati, Purwanugraha, Herbertus Andre, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006. *Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta.
- Ulum, MD. Ihyaul, 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan kedua. Malang: UMM Press.